

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN CIREBON

Dani Lukman Hakim^{1*)}

¹⁾Program Studi Agribisnis, Universitas Presiden

^{*)}Email korespondensi: dani.lukman@president.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan utama terjadinya ancaman krisis pangan di Indonesia adalah menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena konversi lahan sawah. Penurunan luas sawah berdampak sangat nyata terhadap penurunan produksi padi sebagai bahan makanan utama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik lahan di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sesuai amanah Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Metode yang digunakan adalah metode survei dan analisis spasial dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini menggali kondisi fisik dan biokimia tanah, pola penggunaan lahan, serta potensi produktivitas pada lahan obyek pengamatan. Data sosial ekonomi dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan stakeholders yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam penggunaan lahan yang berdampak pada keberlanjutan produksi pangan. Beberapa area menunjukkan adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, sedangkan sebagian besar area lainnya masih berupa lahan pertanian, baik sawah ataupun non-sawah. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, hasil analisa luasan LP2B di lokasi studi yang meliputi 10 Kecamatan sekitar 20448 ha adalah sebagai berikut: Kecamatan Gunungjati 750 ha, Kecamatan Kapetakan 2700 ha, Kecamatan Suranenggala 1500 ha, Kecamatan Jamblang 1029 ha, Kecamatan Arjawinangun 1313 ha, Kecamatan Pangurangan 1640 ha, Kecamatan Ciwaringin 1000 ha, Kecamatan Susukan 3300 ha, Kecamatan Gegesik 5123 ha dan Kecamatan Kaliwedi 2133 ha. Berdasarkan hasil analisa kesesuaian lahan dan kriteria LP2B disimpulkan bahwa semua wilayah kecamatan yang menjadi lokasi studi memenuhi kriteria baik ditinjau dari aspek karakteristik fisik lahan, kecukupan lahan yang tersedia dan aspek sosial.

Kata kunci: alih fungsi, analisis spasial, berkelanjutan, lahan pangan, sistem informasi geografis

ABSTRACT

The main cause of the threat of food crisis in Indonesia is the decline in soil fertility and reduction in land area due to the conversion of paddy fields to non-rice fields. The decreasing area of rice fields has a very real impact on the declining production of rice as the staple food in Indonesia. This research aims to identify the characteristics of land in several areas (sub-districts) in Cirebon

Regency to be used as sustainable food agricultural lands (LP2B), in accordance with the mandate of Law No. 41 in 2009 about PLP2B. The method used in this research was survey and spatial analysis using Geographic Information System (GIS) technology. This research explored the physical and biochemical conditions of the soil, land use patterns and potential productivity on each land that was the object of observation. Socioeconomic data were collected through field observations and interviews with stakeholders directly involved in land management. The research results show that there were significant variations in land use impacting the sustainability of food production. Some areas showed a change in land use from agricultural to non-agricultural land, while most of the other areas were still agricultural land, either rice fields or non-rice fields. Based on the specified criteria, the results of the analysis of the area of LP2B in the study location were calculated covering 10 sub-districts, approximately 20448 ha with the following details: Gunungjati sub-district 750 ha, Kapetakan sub-district 2700 ha, Suranenggala sub-district 1,500 ha, Jamblang sub-district 1029 ha, Arjawinangun District 1313 ha, Pangurangan District 1640 ha, Ciwaringin District 1000 ha, Susukan District 3300 ha, Gegesik District 5123 ha and Kaliwedi District 2133 ha. Based on the results of the land suitability analysis and LP2B criteria, it can be concluded that all sub-district areas that became the study locations meet the criteria in terms of the physical characteristics of the land, the adequacy of available land, as well as the social aspects.

Keywords: land conversion, spatial analysis, sustainability, food land, geographic information system

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian menjadi penting karena kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam bentuk kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi dan kontribusi devisa (Gollin, dkk., 2002). Sektor pertanian dalam struktur perekonomian Indonesia memiliki posisi yang cukup penting dalam hal kontribusinya terhadap PDB maupun dalam penyerapan tenaga kerja (2022) menyatakan bahwa pembangunan pertanian layak mendapatkan perhatian yang luas dalam pembangunan ekonomi ke depan, baik dalam bentuk investasi yang terus meningkat, pengembangan infrastruktur maupun pengelolaan pasar domestik.

Kebijakan pembangunan pertanian yang bertujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama di perdesaan harus dimulai dari perbaikan sumber-sumber pokok kemajuan pertanian (Ongoro, dkk., 2022). Sumber pokok

kemajuan pertanian adalah kemajuan teknologi dan inovasi, kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat dan terbentuknya kelembagaan sosial yang menunjang. Islam dan Braun (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dapat memberikan stimulus pada sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan dan kota kecil. Setiap kenaikan sebesar 1 USD nilai tambah yang tercipta pada sektor pertanian akan menghasilkan kenaikan nilai tambah pada sektor non-pertanian antara 0.50-1 USD. Ini yang menyebabkan pembangunan sektor pertanian sangat penting dilakukan dan diperhatikan dengan baik oleh setiap negara.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Simulasi terhadap perkembangan jumlah penduduk dunia dan kemampuan lahan dalam menyediakan pangan yang dilakukan oleh Pratama, dkk. (2019) mengarah kepada terjadinya krisis pangan di Indonesia. Sekitar satu milyar penduduk dunia akan mengalami kelaparan jika produksi pangan tidak ditingkatkan sebanyak 3 kali lipat pada kurun waktu 2000-2050.

Permasalahan utama terjadinya ancaman krisis pangan di Indonesia adalah menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena konversi lahan sawah ke non-sawah. Penurunan luas sawah berdampak sangat nyata terhadap penurunan produksi padi sebagai bahan makanan utama di Indonesia (Naylor, dkk., 2007). Pada kurun waktu 5 tahun (1999-2003), neraca luas lahan sawah di Indonesia sudah berkurang seluas 423 857 ha, akibat dari alih fungsi lahan sawah seluas 563159 ha, sementara penambahannya hanya mencapai 139302 ha (Agus dan Irawan, 2006). Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan pentingnya mengalokasikan lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanat tersebut dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 ini diharapkan dapat menekan tingginya laju konversi lahan sawah dan mempertahankan fungsi ekologinya. Christina (2009) juga menyatakan bahwa penyusunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menjamin keberlanjutan pasokan pangan untuk masyarakat dan sebagai upaya perlindungan terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon secara tegas telah mengamanatkan dilindunginya lahan pertanian untuk menjamin kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Bentuk perlindungan lahan pertanian tersebut adalah ditetapkan areal untuk LP2B pada masing-masing kecamatan yang dikelompokkan menjadi lahan basah dan lahan kering. Penelitian ini bertujuan menentukan kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan sebagai LP2B, serta memetakan LP2B di Kabupaten Cirebon.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Sosial Ekonomi

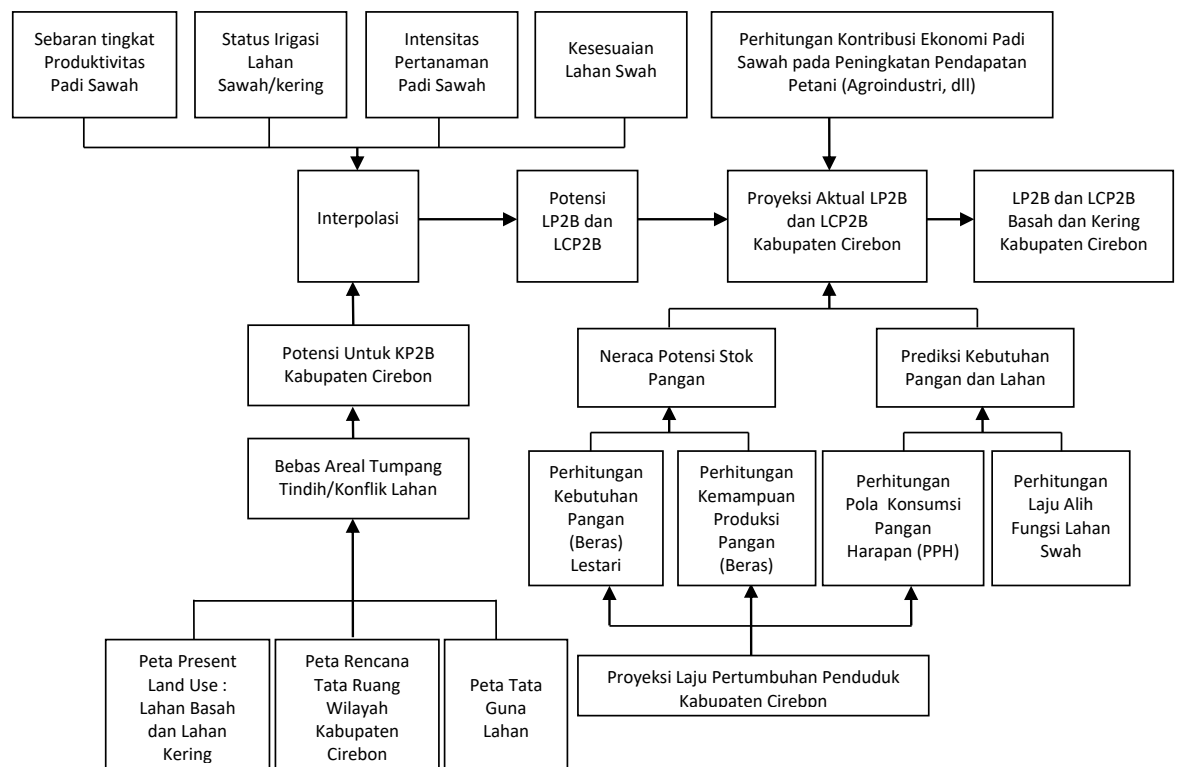
Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan sebagai hasil wawancara mendalam dengan para informan kunci. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan antara lain orang yang memiliki informasi dan pengetahuan luas mengenai sejarah dan kondisi sosial ekonomi setempat. Data sekunder dikumpulkan dari kantor sektor terkait dan BPS. Data yang dikumpulkan berupa laporan, makalah, serta kebijakan terkait pekerjaan.

Teknik Pengumpulan Data Sosial Ekonomi

Data dikumpulkan sebagai berikut: (1) Penelusuran dokumen dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1996); (2) Observasi dengan mengamati terhadap suatu objek untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Komariah dan Satori, 2009). Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi objek penelitian; (3) Wawancara; dan (4) Kuesioner

Evaluasi Lahan dan Analisis Spasial

Pekerjaan dilakukan dalam 4 tahap yaitu: (1) Persiapan penelitian; (2) Pengumpulan dan penyusunan data/peta; (3) Analisis data/peta lahan sawah pada Peta RTRW Kabupaten Cirebon; (4) Interpretasi dan sinkronisasi peta LP2B. Proses penelitian disusun dalam diagram alir seperti pada Gambar 1. Pelaksanaan pekerjaan dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu pemetaan dan analisis data sekunder. Pemetaan didasarkan pada peta lahan sawah dan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Cirebon skala 1 : 25000 dan diolah dengan bantuan *Software Arcview Versi 3.2*.



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

Data yang digunakan adalah: (1) Peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi skala 1:25000; (2) Peta topografi; (3) Peta kesesuaian lahan untuk padi sawah; (4) Peta batas administrasi kecamatan; (5) Peta lahan baku sawah; (6) Data series jumlah penduduk 5 tahun terakhir; (7) Data series kinerja usahatani tanaman pangan tahun terakhir (luas panen, produksi,

produktivitas, indeks pertanaman/IP), (8) Data series neraca bahan makanan 5 terakhir, dan (9) Data alih fungsi lahan sawah 5 tahun terakhir.

Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan

Analisis kebutuhan dan ketersediaan pangan didasarkan pada total kebutuhan kalori mengacu pada PPH dari Departemen Pertanian, yaitu 2200 kkal/kapita/hari untuk persediaan. Jumlah kebutuhan kalori dari bahan pangan sumber karbohidrat yaitu kelompok padi-padian dan umbi-umbian adalah 1232 kkal/kpt/tahun (56%) analisis kebutuhan luas LP2B. Perhitungan kebutuhan luas lahan LP2B (KLP2B) didasarkan pada persamaan berikut.

$$KLP2B = \left\{ \frac{\left(\frac{Kp \times \sum Pt \times 55\%}{P} \right) + Lgp + Las}{IP \times 100} \right\} + La$$

Kp: proyeksi kebutuhan pangan berdasarkan konsumsi beras (ton/kapita/tahun). Total berat kebutuhan beras diperoleh dari konversi kandungan kalori/100 g bahan, $\sum Pt$: Jumlah penduduk pada tahun ke-t (jiwa); 55% adalah angka rendemen beras dari produksi gabah kering giling (GKG); P: tingkat produktivitas padi sawah (ton GKG/ha); Lgp: resiko luas gagal panen (ha); Las: prediksi laju alih fungsi lahan sawah/kering; IP: indek pertanaman padi sawah (%); La: luas lahan sawah untuk mendukung agroindustri dan peningkatan kesejahteraan petani. Proyeksi kebutuhan lahan sawah ini menggunakan beberapa asumsi yaitu luas sawah yang didelineasi tidak mengalami perubahan dan tidak terjadi degradasi lahan dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Berdasarkan Peraturan Daerah No 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031, dan perhitungan menggunakan formulasi KLP2B di atas, maka lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 40000 ha yang tersebar di 40 Kecamatan. Didasari data tentang LP2B tersebut, maka perlu dilakukan survei identifikasi karakteristik lahan

berdasarkan data lahan pertanian serta kesesuaian penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (hasil inventarisasi) dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten khususnya di 10 kecamatan sebagai lokasi studi. Berdasarkan hasil analisa terhadap 10 lokasi studi LP2B maka diperoleh luasan LP2B di masing-masing Kecamatan sampai tingkat desa, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Implementasi kebijakan terkait pengaturan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan memerlukan perhatian terhadap perubahan penggunaan lahan yang dipengaruhi oleh faktor wilayah yang berkembang, demografi, ekonomi, kondisi masyarakat, dan peraturan terkait lahan (Putri dan Wibisono, 2022). Pentingnya peraturan untuk melindungi lahan sawah permanen juga ditekankan sebagai langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan dengan memastikan keseimbangan antara luas lahan sawah, penerapan teknologi, dan jumlah penduduk (Ahmad dkk., 2019).

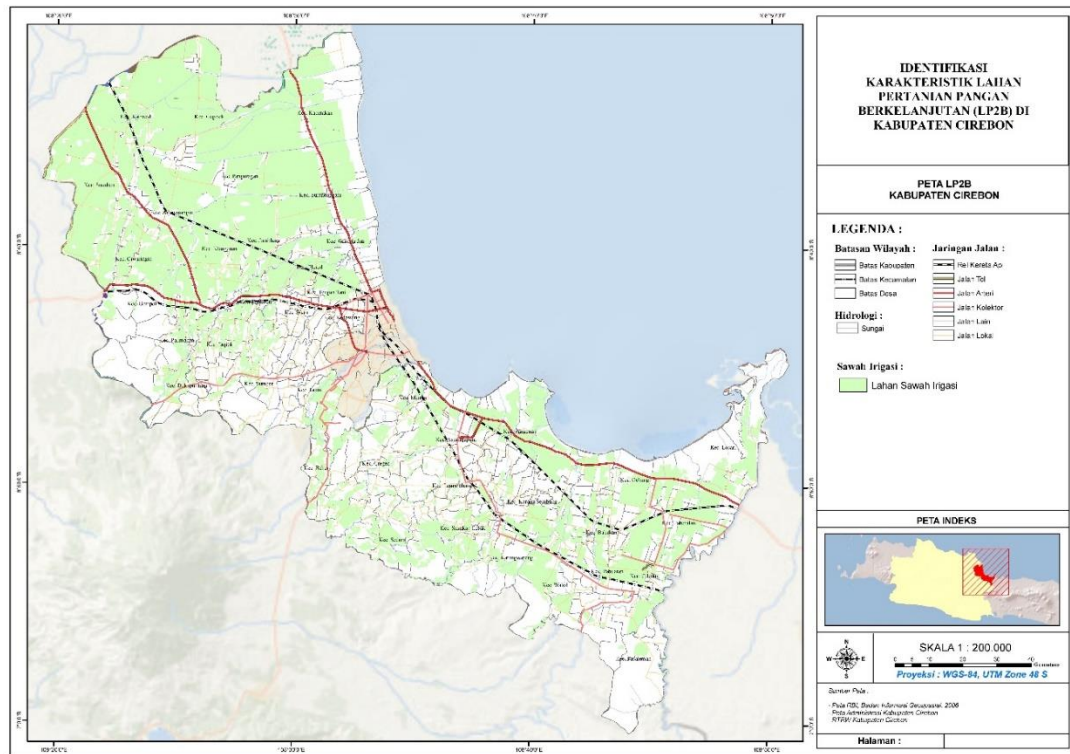
Tabel 1. Data Luasan LP2B/Desa di masing-masing Lokasi Studi

No	Nama Kecamatan	Luasan (ha)
1	Gunungjati	750
2	Kapetakan	2700
3	Suranenggala	1500
4	Jamblang	1029
5	Arjawinangun	1313
6	Panguragan	1640
7	Ciwaringin	1000
8	Susukan	3300
9	Gegesik	5123
10	Kaliwedi	2133
Total Luasan		20448

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Berdasarkan hasil analisa, tergambar bahwa luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di kecamatan terinventarisasi sekitar 20488 ha, di mana Kecamatan Gegesik merupakan kecamatan yang memiliki luasan lahan pertanian cukup luas yaitu 5123 ha, disusul Kecamatan Susukan 3300 ha dan Kecamatan Kapetakan 2700 ha. Sedangkan untuk tingkat desa yang memiliki

lahan pertanian cukup luas adalah Desa Susukan Kecamatan Susukan yang mencapai 630 ha, Desa yang luas lahan sawahnya paling sedikit adalah Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yaitu 30 ha.



Gambar 2. Peta LP2B Kabupaten Cirebon Berdasarkan Luas Lahan Irigasi

Luasan lahan sawah di atas ditentukan berdasarkan kriteria lahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Lahan tersebut ditentukan berdasarkan kriteria fisik seperti tingkat kesuburan tanah, eksistensi jaringan irigasi, akses distribusi, dan indeks pertanaman. Selain itu juga ditentukan berdasarkan kriteria sosial, di mana masyarakat tani setempat memiliki karakter sosial yang kuat dalam pembudidayaan padi sawah. Eksistensi kelembagaan pertanian dalam bentuk kelompok tani merepresentasikan kekuatan karakter sosial komoditas padi sawah di 10 kecamatan yang menjadi lokasi perwakilan dalam studi ini.

Indikator Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Dalam menentukan suatu kawasan lahan pertanian sebagai bagian dari rencana LP2B sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 5 menyebutkan Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa: (a) lahan beririgasi; (b) lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak); dan/atau (c) lahan tidak beririgasi. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B khususnya pasal 8 menjelaskan kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan LP2B harus memenuhi kriteria: (a) memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan (b) menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi dan/atau nasional.

Sesuai hasil survei dapat diketahui bahwa produktivitas indeks pertanaman (IP) atau intensitas pertanaman dalam satu tahun, produksi pertanian dan jenis sawah (irigasi dan non irigasi) di masing-masing lokasi studi mendukung untuk ditetapkan sebagai LP2B. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat produktivitas masa tanam tergolong IP 200 dan IP 300. Produksi pertanian padi cukup tinggi serta jenis sawah (irigasi dan non irigasi) yang masih terjaga dari alih fungsi lahan.

Kriteria LP2B sering kali mencakup berbagai aspek yang meliputi kesesuaian lahan untuk pertanian, ketersediaan sumber daya air, keberlanjutan produksi, dampak lingkungan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Pemilihan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga dapat didasarkan pada analisis multi-kriteria yang melibatkan berbagai faktor seperti kualitas tanah, aksesibilitas, dan potensi produktivitas (Chairuddin, 2018; Zulkarnain dan Hartanto, 2020). Selain itu, kriteria LP2B juga mencakup aspek sosial-ekonomi, seperti partisipasi petani, keberlanjutan ekonomi, dan dampak sosial dalam pengelolaan lahan pertanian. Strategi implementasi LP2B sering kali melibatkan peningkatan produktivitas, kerjasama antara sektor swasta dan kelompok petani, serta penguatan institusi terkait (Wijayanti, dkk., 2016). Keberlanjutan lahan

pertanian pangan juga dapat diukur dengan indeks keberlanjutan yang mencerminkan keberlanjutan lahan sawah di suatu wilayah (Gandhi, dkk., 2022).

Produktivitas Indeks Pertanaman (IP)

Produktivitas indeks pertanaman (IP) atau intensitas pertanaman merupakan salah satu indikator yang dijadikan acuan dalam menentukan kelayakan suatu lahan/kawasan persawahan sebagai LP2B. Secara umum indeks pertanaman di wilayah studi yang meliputi Kec. Arjawinangun, Kec. Ciwaringin, Kec. Gegesik, Kec. Kaliwedi, Kec. Kapetakan, Kec. Panguragan, Kec. Gunungjati, Kec. Suranenggala, Kec. Susukan, Kec. Jamblang termasuk IP 200 dan IP 300 sehingga produksi pertanian dapat dijaga kesinambungannya kecuali pada saat musim kemarau produksi pertanian mengalami penurunan.

Secara topografi kecamatan yang menjadi lokasi studi LP2B tergolong wilayah yang kompleks, memiliki topografi yang beragam sehingga pola tanam yang dilaksanakan oleh para petani belum seluruhnya dapat diarahkan pada IP 300. Dengan berasumsi penetapan LP2B Kabupaten Cirebon bahwa pentingnya pelaksanaan program indeks pertanaman pertanian yang dapat mengangkat kesejahteraan petani serta terpenuhinya kebutuhan padi untuk masyarakat lokal, maka perlu dilakukan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya berkaitan dengan kondisi dan kesesuaian lahan sebagai faktor penting dalam pertanian, sumber air yang ada, percepatan persemaian, pengolahan tanah dan tanam padi, pemusnahan sisa tanaman yang terserang hama, dan memanfaatkan program asuransi usaha tani padi jika terjadi kegagalan dalam usaha taninya.

Penelitian menunjukkan bahwa analisis Indeks Produktivitas (IP) memberikan wawasan berharga dalam menilai potensi produksi pangan lahan pertanian. Dengan mempertimbangkan kekayaan intelektual, pembuat kebijakan dapat merancang strategi untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan produksi pangan berkelanjutan. Selain itu, intensitas tanam yang optimal menjadi pedoman dalam

merencanakan pola pergiliran tanaman yang sesuai untuk menjaga kesuburan tanah dan mendukung kelestarian ekosistem pertanian.

Indeks Pertanaman (IP) merupakan parameter penting dalam mengevaluasi produktivitas pertanian. Studi oleh Agustiani, dkk. (2022) menyoroti pentingnya optimalisasi indeks pertanaman untuk meningkatkan produktivitas dan hasil padi. Selain itu, penelitian oleh Pujiharti (2017) juga menekankan bahwa peningkatan produksi padi dapat dicapai melalui peningkatan IP. Dengan mengurangi kesenjangan hasil dan kehilangan hasil, serta meningkatkan produktivitas lahan, peningkatan IP menjadi kunci dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

Produksi Pertanian

Produksi padi di wilayah studi LP2B sesuai data primer adalah 273866.98 ton dengan hasil 597004/ha dan luas panen 34513 ha. Kec. Gegesik merupakan kecamatan yang menyumbangkan cukup tinggi yaitu 66596.40 ton dengan luas panen sekitar 10069 ha sedangkan Kec. Arjawinangun merupakan kecamatan yang terkecil dengan produksi 8.69 ton dari luas panen 1109 ha (Tabel 2).

Luas panen, hasil/hektar dan produksi padi sawah/kecamatan di lokasi studi LP2B perlu dipelihara secara konsisten dengan memanfaatkan fasilitas kemudahan-kemudahan bagi para petani sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B. Hal ini penting dilakukan mengingat pesatnya pembangunan di Kabupaten Cirebon yang berdampak terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian.

Konversi lahan pertanian ke non-pertanian secara langsung akan berpengaruh terhadap produksi pangan, apabila dibiarkan tanpa upaya pengendalian dan pengawasan. Ketersediaan lahan pertanian akan berdampak terhadap ketahanan pangan sehingga akan mengancam ketersediaan pangan. Hal ini dipacu di antaranya perkembangan yang sangat cepat di Kec. Arjawinangun yaitu pembangunan kompleks pendidikan sehingga mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.

Tabel 2. Luas Panen, Hasil/Hektar dan Produksi Padi Sawah/Kecamatan di Lokasi Studi LP2B

No	Lokasi	Luas Panen (ha)	Hasil/ha (ton/ha)	Produksi (ton)
1	Kecamatan Arjawinangun	1109	8210	8691
2	Kecamatan Ciwaringin	2203	6.56	14453.,50
3	Kecamatan Gegesik	10069	91.25	66596.40
4	Kecamatan Kaliwedi	3292	7.99	34556.97
5	Kecamatan Kapetakan	5200	7.46	41066.72
6	Kecamatan Pangurungan	3170	100.574	36296.41
7	Kecamatan Gunungjati	975	86860	9104.54
8	Kecamatan Suranenggala	138	151.29	5384.34
9	Kecamatan Susukan	6741	6.71	45232.1
10	Kecamatan Jamblang	1616	60.100	12485
Jumlah		34513	597.004	273866.98

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Sawah Irigasi dan Non-Irigasi

Sebagaimana telah diatur dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa yang menjadi prioritas utama lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B adalah 3 kategori yaitu: (1) lahan beririgasi; (2) lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak); serta (3) lahan tidak beririgasi. Lahan-lahan ini bersumber dari lahan yang sudah ada didasarkan atas kriteria: (a) kesesuaian lahan; (b) ketersediaan infrastruktur; (c) penggunaan lahan; (d) potensi teknis lahan; dan/atau (e) luasan kesatuan hamparan lahan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei yang dilaksanakan terhadap 10 lokasi studi LP2B menunjukkan potensi lahan pertanian seluas 65481.356 ha, terdiri dari lahan pertanian sawah irigasi teknis seluas 32922.086 ha dan lahan pertanian sawah non irigasi seluas 17533.25 ha. Luas sawah irigasi cukup dominan dibandingkan sawah non-irigasi, di mana luasan lahan sawah irigasi mencapai 32922.086 ha sangat mendukung produksi padi (Tabel 3). Penetapan LP2B Kabupaten Cirebon berdasarkan kriteria irigasi merupakan amanat undang-undang yang perlu dijaga keberadaannya termasuk kecukupan air dan infrastruktur yang terbangun. Kondisi lahan sawah yang ada adalah aset yang harus dilestarikan agar menjadi aset yang berkelanjutan.

Tabel 3. Potensi Lahan Pertanian di Kecamatan Lokasi Studi LP2B

No	Lokasi	Irigasi (ha)	Non Irigasi (ha)	Jumlah (ha)
1	Kecamatan Arjawinangun	1488	-	1488
2	Kecamatan Ciwaringin	1017.23	134.77	1152
3	Kecamatan Gegesik	5343.19	57.50	5400.69
4	Kecamatan Kaliwedi	2064.82	154.18	2219
5	Kecamatan Kapetakan	2441	559	30000
6	Kecamatan Pangurangan	13687.486	15966.00	17653.506
7	Kecamatan Gunungjati	878	97	975
8	Kecamatan Suranenggala	1031	482	1513
9	Kecamatan Susukan	3792.36	54.80	3878.16
10	Kecamatan Jamblang	1179	28	1202
Jumlah		32922.086	17533.25	65481.356

Sumber: Hasil Analisa, 2024

KESIMPULAN

Berlakunya Peraturan Daerah No. 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 yang salah satu pointnya berkaitan dengan LP2B selain sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya penyelamatan lahan pertanian pangan yang dari waktu ke waktu terus mengalami penyusutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 40000 ha yang tersebar di 40 Kecamatan. Luasan LP2B di lokasi studi hasil perhitungan yang meliputi 10 Kecamatan kurang lebih 20448 ha. Terdapat lahan sawah irigasi dan non-irigasi pada LP2B yang perlu diperhatikan kesinambungan kecukupan airnya. Khusus untuk sawah irigasi yang menggunakan sumber daya air yang berasal dari aliran sungai perlu terjaga kualitasnya agar produksi pertanian tetap stabil. Berdasarkan hasil analisa kesesuaian lahan dan kriteria LP2B sesuai Undang-Undang 41 Tahun 2009, semua wilayah kecamatan yang menjadi lokasi studi memenuhi kriteria baik ditinjau dari aspek karakteristik fisik lahan, kecukupan lahan yang tersedia, dan juga aspek sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. dan Irawan. 2006. *Agricultural Land Conversion as a Threat to Food Security and Environmental Quality*. Jurnal Litbang Pertanian. 25(3):90-98.
- Agustiani, N., I. Gunawan, S. Margaret & S. Sujinah. 2022. Pola Tanam Padi untuk Produktivitas Tinggi dan Indeks Pertanaman yang Optimal di Lahan Rawa Pasang Surut. *Indonesian Journal of Agronomy*. 50(3): 257-265.
- Ahmad, D., N. Safitri & K. Khoiriyah. 2019. Impor Beras dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan atau Kebutuhan. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2): 123-131.
- Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairuddin, Z. 2018. Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan: Zonasi Lingkup Kawasan Mamminasata Menggunakan Pendekatan MCDM. *Jurnal Ecosolum*. 7(2): 46.
- Christina, D.R. 2009. Identifikasi Lahan Potensial untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat). Thesis Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Gandhi, P., N. Nindyanoro & I. Darmawan. 2022. Analisis Multidimensi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. *Cakrawala*. 16(1): 1-28.
- Gollin, D., S. Parente & R. Rogerson. 2002. *The Role of Agriculture in Development*. *American Economic Review*. 92(2): 160-164.
- Islam, N. & J.V. Braun. 2008. *Agricultural Growth and Economic Development: a View Through the Global Economic History Lens*. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*. 52(4): 387-403.
- Komariah, A. dan D. Satori. 2009. *Metodologi penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Naylor, R., D. Battisti, D. Vimont, W. Falcon & M. Burke. 2007. *Assessing Risks of Climate Variability and Climate Change for Indonesian Rice Agriculture*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 104(19): 7752-7757.
- Ongoro, E., E. Ontita & O. Chitere. 2022. *The contribution of New Rice for Africa (Nerica) Farming to Livelihood Security of Smallholder*

Households in Migori, Kenya. Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology. 369-382.

- Pratama, A., S. Sudrajat & R. Harini. 2019. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Indonesia Tahun 2018. *Media Komunikasi Geografi.* 20(2): 101.
- Pujiharti, Y. 2017. Peluang Peningkatan Produksi Padi pada di Lahan Rawa Lebak Lampung. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian.* 36(1): 13.
- Putri, A. dan B. Wibisono. 2022. Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik.* 13(4): 323.
- Risti, P. 2022. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian di Lubuk Aur Pesisir Selatan. *Jambura Journal Community Empowerment.* 34-43.
- Wijayanti, A., K. Munibah & E. Putri. 2016. Strategi Implementasi untuk Mengendalikan Konversi Lahan Sawah di Kota Sukabumi. *Jurnal Tataloka.* 18(4): 240.
- Zulkarnain, Z. dan R. Hartanto. 2020. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Hulu. *Agrifor.* 19(2): 347.